

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kekuatan Politik

Budiardjo (1988: 52) dalam Sitepu (2004) menyatakan bahwasannya:

“Kepekaan institusional pribadi termasuk kekuatan politik yang tidak lebih dari aktor politik atau aktor dalam kehidupan politik, dan individu-individu ini terdiri dari individu-individu yang ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Secara kelembagaan, kekuatan politik di sini dapat berupa sistem institusional atau bentuk pelembagaan lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.”

Effendy (2000: 197) dalam Sitepu (2004) yakni:

“kekuatan tersebut formal atau informal. Kekuatan atau pengelompokan politik formal berbentuk partai politik. Kekuatan politik informal, di sisi lain, adalah bagian dari pembangunan masyarakat sipil..”

2. Orang Kuat Lokal

Dipandang sebagai efek dari perubahan sosial masyarakat masa lalu. Atau dikenal dalam terminologi Marx sebagai wacana pandangan materialis. (Jone, 2009 : 78)

Dimana globalisasi, penjajahan dan industrialisasi telah menghasilkan dampak yang begitu besar. Huntington mengatakan bahwa perubahan Komunitas dunia negara-negara yang menduplikasi gambaran negara kuat dan negara lemah tidak dikondisikan oleh berbagai jenis

pemerintahan yang dianut., melainkan efektivitas kinerja pemerintahannya (Migdal, 2008 : 59)

Bangsa, pada satu titik, adalah satu-satunya simbol Didorong oleh dinamika kehidupan masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan yang sangat besar. Semua kebijakan terpusat dengan kedok satu bangsa sebagai pemilik tunggal otonomi. Bangsa menjadi kekuatan yang tak terbandung. Pada saat yang sama, kritik terhadap pengaruh peran sentral Lamatrama kemudian ditinggalkan oleh para ilmuwan/cendekiawan sosio politik. (Migdal, 2008)

Pasca berakhirnya penjajahan, kita dihadapkan pada fenomena baru dibandingkan satu dekade terakhir. Dengan kata lain, munculnya beberapa negara lemah, tidak mampu mempengaruhi masyarakat, berjuang untuk mengatur warganya, berjuang untuk menegakkan aturan konstitusional, dan memaksakan wilayah mereka. .. Negara tidak dapat melaksanakan berbagai prakarsa politik untuk pengembangan kehidupan publik di masyarakat. Dalam hal ini, Joel S. Migdal Bansa mencoba menjelaskannya.

Secara lengkapnya Joel S. Migdal (2008: 63) mengatakan:

“The state is a widespread organization in a society that coexists with many other formal and informal social organizations, from families to tribes to large industrial corporations. The state is a government agency, at least in modern times. They singled out the fact that they seek dominance over many of these other organizations, in other words they make binding rules for the state to control the behavior of people, or at least certain others, and aim to empower an organization establish these rules in a particular area. A "rule" is a law indicating that state officials are willing to enforce it through freely available enforcement action. It means regulations, laws and ordinances. The rules cover everything from contractual obligations to driving on the right side of the road to

paying loved ones on time. They cover the entire range of ownership. Countless other boundaries that define acceptable human behavior”

“Negara adalah berbagai organisasi sosial yang hidup berdampingan dengan banyak organisasi sosial formal dan informal lainnya, dari keluarga dan suku hingga perusahaan industri besar. Setidaknya di zaman modern, negara-negara berbeda dalam hal pejabat negara mencari keuntungan atas banyak organisasi lain. Artinya, tujuan mereka bagi negara adalah untuk menciptakan aturan yang mengikat yang memandu tindakan orang, atau setidaknya untuk memberdayakan / mengontrol organisasi lain, terutama untuk menetapkan aturan untuk aspek-aspek tertentu. .. "Aturan" berarti hukum, peraturan dan keputusan. Misalnya, pejabat pemerintah dipaksa untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk menegakkannya. Aturan mencakup segala sesuatu mulai dari subsisten, kewajiban kontrak, mengemudi di sisi kanan jalan hingga membayar tunjangan tepat waktu. Mereka mencakup semua bentuk kepemilikan melalui segudang definisi lain dari batas-batas yang menggambarkan perilaku yang dapat diterima secara sosial..”

Kelompok-kelompok seperti suku, marga, bahkan aliran agama adalah semua kemungkinan kekuatan yang dapat menghambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan berbagai aturan dan simbol pembangunan yang diamanatkan pemerintah. Ada banyak hal seperti itu dalam karya dan pengalaman negara-negara dunia ketiga.

Di sisi lain, situasi di negara-negara Dunia Ketiga yang baru tidak sempurna. Menurut Migdal, beberapa teori dapat menjelaskan apapun tentang suatu negara yang tidak dapat mencapai legitimasi hegemoni sosial dalam masyarakat. Teori modernisasi mengabaikan konflik di dalam negara, teori Marxis menyebabkan perjuangan kelas, seringkali terlalu terpusat. (Migdal, 2008 : 65)

Untuk itu, Migdal mengusulkan apa yang dia sebut pendekatan "negara sosial". Ini menggambarkan masyarakat bukan sebagai dikotomi, tetapi sebagai tempat organisasi sosial yang saling berhubungan.

“The model I propose, which I call national society, describes society as a fusion of non-governmental organizations rather than a dichotomy. Various formations, including state ideas, and many other formations (which may or may not include parts of the state) have individual survival strategies and, in some cases, advancement strategies that are provided singularly or individually. The individual strategy decisions are based on the significant incentives - coercion that an organization can exercise and the use of symbols - values by social organizations. These symbols and values strengthen the form of social control in society or create a new form of social life. In fact, this struggle goes on in all societies. Society is not static, but is constantly becoming the result of this struggle for social control. ” (Migdal, 2008 : 49)

“Model yang saya usulkan, yang saya sebut masyarakat nasional, menggambarkan masyarakat sebagai campuran dari organisasi sosial yang berbeda, bukan hanya sebagai struktur dua tingkat. Berbagai formasi, termasuk ide-idenegara, dan banyak formasi lainnya (yang mungkin atau mungkin tidak termasuk bagian dari negara) memberikan individu dengan strategi bertahan hidup individu, beberapa di antaranya melihat ke atas. Pilihan strategi individu didasarkan pada insentif yang signifikan dari lembaga wajib yang dapat menerapkan, menerapkan, dan menggunakan simbol dan nilai organisasi tentang bagaimana kehidupan sosial harus dilaksanakan. Simbol dan nilai tersebut memperkuat kontrol sosial dalam masyarakat atau menciptakan bentuk kehidupan sosial yang baru. Sebenarnya, perjuangan ini berlangsung di semua masyarakat. Masyarakat bukanlah telur yang statis, ia selalu mencari hasil dengan memperjuangkan kontrol sosial.”

Negara tidak hanya dihadirkan sebagai sarana konflik kepentingan antara organisasi sosial yang berbeda bersaing untuk kontrol sosial dalam masyarakat, tetapi juga dilemahkan oleh kekalahan negara di tangan kekuatan informal di luar struktur nasional. negara. Paling tidak, visi Migdal tentang negara lemah menghidupkan kembali asumsi umum Weber bahwa negara didefinisikan sebagai satu-satunya entitas politik yang memiliki hak yang jelas untuk memonopoli kekerasan yang terjadi di masyarakat.

“Migdal percaya bahwa negara bukanlah satu-satunya organisasi yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Seperti negara, semakin banyak organisasi berbeda di luar negara yang mencoba

mempengaruhi kedaulatan babi. Semua itu mereka lakukan tidak hanya untuk memberikan dukungan berupa rasa aman, tetapi juga memberikan sanksi sosial bagi siapa saja yang tidak patuh. Hukuman sosial ini bisa berbentuk “isolasi” dari kekerasan. Dengan banyaknya organisasi yang tumbuh di luar negeri dengan cara ini, orang dihadapkan pada keputusan yang sulit untuk memilih salah satunya. Ternyata benar-benar kelompok yang bisa memfasilitasi konstruksi, strategi bertahannya. Masyarakat dalam hal ini bukan berarti hidup bebas tanpa aturan yang membatasi dan mengaturnya, tetapi kenyataan bahwa mereka masih hidup menurut aturan hukum, tetapi terdesentralisasi. .. Hal ini secara bersamaan diatur oleh peraturan dan sistem hukum yang berbeda. Pelaksanaan kontrol sosial yang berhasil atas para anggotanya, tidak hanya ketika semua aspek aturan organisasi dipatuhi, tetapi juga ketika tingkat legitimasi yang dianugerahkan oleh organisasi sesuai. Keyakinan dan pengetahuan.” (Lambach, 2004)

Jika kedaulatan tidak mempertahankan kontrol negara, negara akan melemah dan orang-orang akan mematuhi aturan organisasi informal di luar negara. Oleh karena itu, perjuangan kontrol sosial dalam masyarakat mutlak diperlukan, karena upaya mobilisasi kolektif dilakukan hanya jika tiga unsur partisipasi, kepatuhan, dan legitimasi terpenuhi.

Isu yang paling penting adalah "proses denda dan perbedaan penggunaan subsidi - bonus materi, pemaksaan - manipulasi simbolis kehidupan sosial". Menurut Migdal, kehadiran penguasa lokal. Pemimpin lokal mengatakan, "Sebagai kekuatan informal untuk memonopoli kontrol masyarakat dalam batas-batas.

“Mereka menempatkan diri mereka atau keluarga mereka di banyak posisi kunci untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan sesuai dengan keinginan mereka, bukan retorika resmi, pernyataan kebijakan, undang-undang atau undang-undang. Aturan yang diadopsi oleh pusat atau dikeluarkan oleh penegak aturan yang kuat (Migdal 2008:256).”

Kehadiran lokal yang kuat dalam dinamika politik lokal Indonesia

dapat ditelusuri kembali ke budaya lokal yang berbeda. Koalisi militer lokal memiliki kondisi yang berbeda di setiap daerah. Misalnya, di Banten, penampilan seorang pribumi yang kuat dilambangkan dengan julukan Javara. Sedangkan di Madura istilah Strong Local dikenal dengan Blatter. Secara historis, keberadaan dan kedudukan mereka prakolonial dan prakolonial. Mereka lahir dari pengalaman kekerasan yang berbeda di sekitar mereka. Sikap, perilaku, dan cara pandang umum dalam masyarakat merupakan benih-benih internalisasi budaya kekerasan khas pribumi yang kuat. Padahal, dulu mereka sering disamakan dengan pemberontak, pembela rakyat dan pendukung orang miskin. Mereka berjuang dengan kekuatan dan keberanian mereka melawan kehendak para elit feodal kolonial dan lokal. (Halim, 2014 : 60).

Migdal menyimpulkan bahwa kehadiran mereka merupakan efek dari pola kebiasaan yang mengakar di masyarakat. Dan last but not least, kehadiran penduduk lokal yang kuat adalah akhir dari efektivitas dan kontrol bangsa secara otomatis menjadi lemah, sehingga bangsa tidak lagi memiliki kendali atas masyarakat.

Mengenai asal-usul kekuatan lokal, Migdal memiliki tiga pendapat yang saling terkait tentang kekuatan lokal.:

- 1) Para pemimpin lokal berkembang dalam masyarakat "seperti jaringan" yang disebut "kelompok kompleks dari organisasi sosial yang hampir independen" "Kontrol sosial" dan "pemisahan" yang efektif. Pola khusus dari kontrol sosial yang terfragmentasi ini sering dipandang sebagai bagian integral dari pemerintahan kolonial, termasuk para pemilik tanah. Karena struktur masyarakat yang saling berhubungan, pengaruh lokal telah memperoleh pengaruh yang jauh lebih besar daripada apa

yang disebut Migdal sebagai pemimpin "Segitiga Adaptasi", birokrasi lokal.”

- a. Terinspirasi oleh Migdal, penulis cenderung membingkai diskusi dalam istilah 'keegoisan', 'fokus pelanggan' dan 'hubungan sponsor-pelanggan', mengubah orang-orang lokal yang berpengaruh menjadi pelanggan miskin dan pengikut keterampilan mereka untuk keuntungan positif..
- b. Keberhasilan pemimpin daerah dalam mengelola sumber daya lembaga negara menghambat upaya pemimpin negara untuk menerapkan berbagai kebijakan dan menjatuhkan sanksi. (Halim, 2014 : 65)

Teori Local Strongman digunakan karena tema Local Strongman memiliki tiga pembahasan menarik yang menganalisis kemenangan H. Deni sebagai kepala desa Cilampunghilir Kabupaten Tasikmalaya.

3. Teori Patron-Klien

Sebuah hubungan timbal balik antara kelas petani kaya (patron) dengan kelas petani miskin (klien) yang secara mendasar bersifat saling menguntungkan. (Scott, 2013: 2), secara spesifik keadaan timbal balik yang menguntungkan tersebut lama kelamaan mengalami degradasi. Perubahan sosial masyarakat pedesaan (baik pesisir maupun pegunungan) mengakibatkan terjadinya *social gap* antara patron dengan klien. Contoh misal adalah semakin bertambahnya populasi klien mengakibatkan jumlah persaingan dalam aktivitas ekonomi pada kelompok klien semakin tajam. Hal ini kemudian menjadikan patron mereka memiliki pilihan dalam mengeliminasi klien-klien yang dianggap sudah tidak kompeten untuk meneruskan merawat tanah patron-nya.

Menurut James Scott (2013: 30) terdapat beberapa perubahan yang memberikan dampak pada hubungan Patron-Klien, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1**Neraca Pertukaran Hubungan Patron Klien**

Sifat Perubahan	Dampak pada hubungan Patron Klien
1. Meningkatnya pemilikan lahan yang tidak seimbang	Kendali akan lahan menjadi dasar utama dari patronasi; posisi pemilik lahan menguat dalam berurusan dengan klien yang mencari akses terhadap lahan yang dikuasai secara sempit.
2. Perubahan populasi	Posisi pemilik lahan menguat dalam penawaran dengan kaum tani yang meningkat yang mencari akses terhadap tanah.
3. Fluktuasi harga produsen konsumen di bawah pertanian komersial	Posisi pemilik lahan menguat selagi petani miskin memerlukan kredit, peringanan, bantuan pemasaran dan lain-lain.
4. Hilangnya sumber daya lepas (lahan yang belum alternative dibuka, padang gembala bersama, bahan bakar gratis, dan lain-lain)	Melemahnya mekanisme keamanan melemahkan posisi tawar menawar klien-petani dengan elit.
5. Memburuknya mekanisme pemerataan desa	Sama dengan di atas
6. Negara kolonial melindungi hak milik dari kelas pemilik tanah	Pemilik lahan kurang memerlukan klien lokal yang setia. Karenanya insentif untuk mempertahankan neraca pertukaran yang malahirkan legitimasi berkurang

Sumber: (James Scott. 2013)

Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel diatas, perhatian Scott ditujukan dalam erosi hubungan patron-client. Pada awalnya, sifat-sifat dasar ekonomi agraris yang sejak lama sudah dimiliki oleh masyarakat Asia Tenggara menjadi fondasi dalam kehidupan mereka. Secara bertahap melalui proses kolonisasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, pola hubungan antara patron-client yang pada awalnya sangat menggantungkan pola pertanian subsisten perlahan mengalami transformasi. Bentuk-bentuk transformasi ini merupakan imbas dari tidak diberlakukannya pola-pola adat

setempat yang lebih menitik beratkan pada hak-hak petani dalam penggunaan tanah serta pola-pola tradisional dalam pertukaran tenaga kerja, (Scott, 2013: 29). Era kolonial kemudian menjadikan petani sebagai komoditas tenaga kerja yang dapat diperjual belikan dalam necara pertukaran antara patron-client (Geertz, 2016: 60).

Pada dasarnya, tipikal masyarakat pedesaan mengandalkan keluarga sebagai unit perekonomian yang paling kecil dalam hierarki desa. Dengan begitu sebuah keluarga petani akan semakin makmur apabila memiliki banyak anak dan saudara yang dapat bekerja di ladang. Namun demikian, pada era industrialisasi adanya penguasaan lahan-lahan pertanian oleh sebagian kelompok masyarakat justru menjadikan keuntungan kuantitas keluarga petani tersebut dimanfaatkan oleh para patron.

Model kapitalisasi pertanian ini tidak saja melibatkan patron dan client saja. Situasi kolonialisme yang dimulai sejak masuknya VOC ke Indonesia membuat situasi relasi patron- client bergeser. Awal mula pola hubungan pertanian antara patron dan client tercipta melalui sebuah proses simbiosis mutualisme antara petani dan pemilik tanah. Pemilik tanah memiliki sebidang tanah yang sangat luas dan tidak bisa dikerjakan oleh keluarga pemilik tanah. Petani yang memiliki kelebihan dalam konteks kuantitas jumlah anggota keluarga kemudian menjalin relasi bermotif ekonomi yang menciptakan ikatan patron dan client. Relasi ini berjalan didasari oleh prinsip resiprositas. Dalam hubungan antara petani dan pemilik tanah, keuntungan yang diperoleh oleh petani adalah jaminan pekerjaan

berupa lahan pertanian untuk digarap. Sedangkan pemilik tanah diuntungkan oleh keberadaan petani yang dapat menggarap lahan mereka, sehingga dalam satu keluarga pemilik tanah bisa memiliki beberapa lahan pertanian atau beberapa usaha sekaligus.

Relasi patron-klien yang terjadi antara pemilik tanah dan petani penggarap tidak sampai situ saja. Dalam beberapa kesempatan, apabila client mengalami sebuah musibah berupa kematian seorang anggota keluarga ataupun salah seorang anggota jatuh sakit, maka mengacu pada prinsip resiprositas, patron dari client tersebut akan memberikan bantuan secara materi kepada client. Selain itu, apabila dalam perjalanan relasi patron-client ini pihak client mendapati bahwa pihak patron mengurangi nilai jasa yang diberikan, maka client kemudian memiliki kebebasan dalam memilih patron lainnya. Jadi pada dasarnya sebuah relasi patron-client tidak hanya didasarkan pada sebuah kegiatan ekonomi yang bersifat eksploitatif melainkan adalah sebuah relasi yang didasari azas saling membutuhkan.

Sejak masuknya Belanda melalui VOC di Indonesia, konteks hubungan patron-client tersebut tergerus dengan masuknya teknologi dan pola komodifikasi tenaga kerja. Petani sebagai penggarap lahan pertanian patron kemudian dialihfungsikan menjadi tenaga kerja yang lebih difokuskan untuk menggarap lahan berbasis tanaman ekspor (kopi, tebu, rempah-rempah)

Hal ini mengakibatkan para patron mulai kehilangan legitimasinya terhadap client. Degradasi perubahan ini secara otomatis pula merugikan

pihak client dikarenakan mereka tidak lagi bisa mendapat jaminan kerja sepanjang tahun. Selain itu dengan munculnya pola feodalistik baru ini, para patron kehilangan fungsi pemberi perlindungan dari pihak luar. Hal ini sejalan dengan masih lemahnya kontrol pemerintah setempat saat itu.

Dilihat dari sudut pandang politis, aktivitas perekonomian yang lebih menguntungkan pihak patron cenderung menciptakan situasi masyarakat yang rentan terhadap kebebasan dalam memilih. Pola-pola hubungan patron-klien secara ekonomis pada akhirnya membuat para patron tidak hanya berkuasa atas aktivitas ekonomi dengan klien, terlebih dengan terjadinya perubahan pada neraca pertukaran hubungan status patron-klien⁹. Sehingga mengarahkan klien untuk menggantungkan pilihan-pilihan politik mereka kepada patronnya. Perubahan tersebut disebabkan oleh semakin deras arus modernisasi pertanian, keterbukaan informasi publik, dan penambahan populasi penduduk.

Pola-pola hubungan patron klien pada awalnya bersifat ekonomis. Sejalan dengan perubahan pada masyarakat petani, secara perlahan dengan semakin kuatnya legitimasi politik patron kepada klien, ditambah dengan adanya hubungan-hubungan feodalistik antara patron dengan pihak luar, mengakibatkan pola-pola patronasi cenderung menjalar ke pola-pola patronasi politik. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan kekakuan aktivitas ekonomi maupun politik yang sudah menjadi fondasi perilaku masyarakat pedesaan sedikit bergeser.

Untuk menggambarkan situasi patronasi politik tersebut, dapat kita

pelajari dari peristiwa pada pemilu orde baru dimana dominasi politik dari sebuah partai besar masuk sampai ke desa- desa mempengaruhi patron-patron di desa untuk memilih partai tersebut dalam pemilu, (Wahyono Hadi, 2012: 44) Sedangkan saat ini pengaruh pihak luar (negara) dalam patronasi politik terkonsentrasi pada penataan kebijakan yang mampu menggiring opini publik kepada pilihan politik tertentu.

4. Patronase dan Klientelisme

Seiring dengan dinamika politik yang terjadi, dan ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi, membuat masyarakat makin terbuka. Sehingga keterbukaan publik semakin menjadi keniscayaan bersama. Pilihan politik masyarakat Jawa yang cenderung berpatron dalam aliran priyayi, santri, dan abangan seolah-olah hanya dipergunakan sebagai kedok aktor-aktor politik dalam berkampanye memperoleh suara. Dugaan mengenai semakin maraknya money politik tidak hanya diakibatkan oleh minimnya kesadaran calon-calon kepala daerah maupun calon- calon legislatif, melainkan juga diakibatkan oleh semakin mudarnya politik aliran di tataran akar rumput (Aspinal dan Sukmajati, 2015: 380).

Pudarnya politik aliran dalam masyarakat akar rumput ditambah dengan semakin variatifnya pola-pola patronase politik yang dilakukan para calon-calon kepala daerah ditengarai menjadi salah satu penyebab dalam fenomena calon Kepala Daerah yang berasal dari satu keluarga. Secara umum dapat dikategorikan sebagai upaya seorang aktor politik dalam mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Proses mempertahankan

legitimasi kekuasaan ini pada dasarnya sudah menjadi motif secara alamiah. Selayaknya motif ekonomi untuk mempertahankan sumber daya pangan sebagai upaya untuk bertahan hidup, motif politik untuk mempertahankan legitimasi politik juga tidak dapat dipisahkan dengan perihal-perihal yang berkaitan dengan urusan perekonomian. Sudah sangat jelas bahwa relasi antara ekonomi dan politik bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam menjalankan aktivitas politiknya, seorang aktor politik tidak hanya wajib memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pejabat publik, namun juga harus memiliki amunisi sumber daya ekonomi yang dipergunakan sebagai tulang punggung dalam aktivitas politiknya. Kondisi ideal diatas memang sudah selayaknya terjadi sebelum seorang aktor politik memutuskan terjun dalam gelanggang politik baik di tingkat nasional ataupun tingkatan daerah. Sayangnya proposisi ini justru menjadi sebuah ironi ketika sang aktor memanfaatkan kuasa jabatannya untuk mengeruk kekayaan pribadi.

Beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia telah menikmati fase-fase proses demokratisasi yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari tingkatan Provinsi hingga tingkat Desa. Tak pelak dalam beberapa kali Pilkada yang telah dilaksanakan fenomena Politik Uang makin marak terjadi. Namun sayangnya, penelitian dengan basis politik uang di wilayah pedesaan masih sedikit dilakukan oleh para sarjana ilmu sosial di Indonesia. Padahal, dalam beberapa asumsi peneliti mengenai patronase politik di pedesaan, bahwa wilayah pedesaan dianggap menjadi

pendukung menjamurnya patronase politik (Aspinal dan Sukmajati, 2015: 41).

Dengan semakin mudarnya politik aliran, patronase politik yang menggunakan media barang dan jasa dalam pertukarannya, menjadi salah satu bentuk pergeseran yang paling konkret dari proses demokratisasi dalam konteks pemilihan umum. Fenomena patronase sendiri secara umum diartikan sebagai aktivitas politik dengan memberikan materi baik berupa barang maupun jasa dari seorang politisi yang ditujukan kepada calon pemilihnya, baik kepada individu ataupun kepada kelompok tertentu. Kemudian pengertian Klientelisme lebih merujuk kepada karakter sebuah relasi patronase antara patron dan client yang bersifat personal dan pertukaran barang ekonomi diganti dengan dukungan politik (Aspinal dan Sukmajati, 2015: 4).

Klientelisme kemudian diterjemahkan lebih lanjut secara mendalam oleh Hicken dalam (Aspinal dan Sukmajati, 2015) menjadi tiga hal

- a. Kontingensi atau timbal balik artinya setiap jasa maupun materi yang diberikan patron maupun klien adalah suatu bentuk pemberian yang berorientasi pada penerimaan keuntungan, bentuk pertukaran yang dilakukan oleh politisi ataupun pendukungnya adalah pertukaran materi dalam bentuk dukungan politik.
- b. Hierarkis adalah sebuah kondisi adanya penekanan kekuasaan yang timpang antara patron dan klien, sehingga terdapat salah satu pihak yang memiliki rasa keterikatan pada pihak lainnya, perasaan tersebut muncul

karena salah satu pihak ingin terus mendapatkan dukungannya, bantuan, maupun materi. Hal ini menjadi point penting pada hubungan klientelisme, karena ada relasi-relasi yang terbangun antar aktor-aktor terkait. Relasi-relasi ini terdiri dari relasi yang sejajar dan relasi vertikal. Relasi sejajar digambarkan sebagai relasi yang kedua pihak sama-sama memiliki kepentingan dan tidak saling mendominasi satu sama lain. Kemudian relasi vertikal ditemukan pada hubungan antara aktor dan pihak yang tidak memiliki wewenang dan kekuasaan sehingga relasi yang terjalin timpang dan terjadi ketergantungan dari salah satu pihak ke pihak lain.

- c. Pengulangan adalah sebuah relasi yang tidak bersifat sporadis, spontan, dan hanya berlangsung pada satu agenda politik, melainkan relasi yang terus berlanjut pada agenda- agenda politik lainnya bahkan pada kehidupan sehari-hari, hal tersebut terjadi karena salah satu pihak merasa telah mendapatkan pengalaman dari kemampuan pihak lain dalam melakukan tindakan politik.

Sehingga dalam beberapa kasus, sebuah patronase belum tentu bisa dikategorikan sebagai fenomena klientelisme. Demikian ini terjadi apabila politisi yang menjalankan agenda money politik tidak bertatap langsung dengan calon pemilihnya, sehingga kemudian karakter patronase mereka tidak bersifat personal atau tidak saling tatap muka.

Pada literatur studi klientelisme, terdapat tiga aliran sebagai bentuk dari deskripsi klientelisme berdasarkan sudut pandang yang berbeda,

(Burhanudin Muhtadi, 2013: 43).

- a. Aliran determinis yang paralel dengan teori modernisasi. Dalam aliran ini menjelaskan bahwa klientelisme merupakan suatu warisan dari era pramodern dalam relasi sosial politik dan banyak ditemukan pada negara yang masih berkembang. Masyarakat yang menganut klientelisme digambarkan sebagai masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga klientelisme merupakan sistem yang dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang ideal dan sulit untuk diatasi. Terdapat pernyataan bahwa, klientelisme akan mudah diatasi pada negara yang telah maju, namun masih ditemukan klientelisme pada negara yang telah makmur dengan tingkat kemiskinan yang rendah dan tingkat pendidikan yang tinggi seperti Jepang, Belgia, Austria, Korea Selatan, Italia, dan Prancis. Hal tersebut merupakan sebuah bukti bahwa klientelisme dapat ditemukan pada negara yang masih berkembang maupun negara yang telah maju, hanya saja resonansinya akan lebih tinggi ditemukan pada negara yang masih berkembang. Dapat disimpulkan bahwa klientelisme tumbuh pada setiap lapisan masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat yang tradisional dan bertahan melalui kode-kode informal baik melalui nilai-nilai maupun norma-norma sosial yang dijaga secara terus-menerus.
- b. Aliran kebudayaan yang menjelaskan bahwa fenomena patron-klien merupakan sebuah produk sosial budaya yang menggambarkan sosok patron dengan keistimewaan tertentu sebagai seseorang yang

memberikan materi maupun barang sebagai bentuk penghargaan bagi loyalisnya (klien). Dalam kehidupan bermasyarakat, klientelisme tidak hanya sekedar hubungan sosial melainkan telah menjadi *political subculture*, sehingga klientelisme merupakan sebuah budaya dengan sifat unik, tetap, dan tidak berubah yang melekat pada setiap individu dalam masyarakat. Hal tersebut membuat klientelisme sulit untuk dihilangkan maupun direduksi karena merupakan integral dari budaya masyarakat dan cenderung mengabaikan perkembangan sosial, budaya, serta politik.

- c. Pendekatan institusional yang menjelaskan bahwa tingginya tingkat resonansi sistem patron- klien merupakan salah satu dampak yang disebabkan karena adanya campur tangan dari para politisi, hal tersebut dipicu dengan tingginya tingkat persaingan untuk mendapatkan kekuasaan dan diterapkannya sistem multipartai, sehingga politisi akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, baik dengan pencitraan sebagai tokoh dari golongan tertentu atau melakukan tindakan positif bahkan melakukan tindakan negatif dengan tujuan untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Dalam aliran ini menjelaskan bahwa patron-klien tumbuh subur pada daerah yang masih memiliki sistem politik yang buruk dan tingkat perekonomian yang rendah namun dengan pembelahan etnik yang kuat, sehingga masyarakatnya akan lebih peduli terhadap keuntungan sesaat daripada keuntungan bersama yang akan diperoleh dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebutlah yang

memicu tindakan *money politic* dari para politisi, namun hal tersebut dianggap sebagai suatu akuntabilitas karena politisi harus memberikan imbalan kepada para pemilihnya.

Menurut (Aspinal dan Sukmajati, 2015: 380) Bentuk dari klientelisme sering terlihat pada politik aliran yang banyak ditemui di Indonesia, politik aliran sendiri merupakan suatu bentuk kelompok masyarakat yang bersifat komunal dan cenderung tradisional dengan menganut suatu aliran agama tertentu maupun aliran tradisional lainnya yang memiliki pengaruh maupun orientasi terhadap politik, namun politik aliran sendiri telah mulai memudar kondisi masyarakat yang terus berkembang dan menjadi modern, hal tersebutlah yang kemudian merubah sistem klientelisme, dari yang dipengaruhi oleh sifat masyarakat tradisional hingga klientelisme yang dipengaruhi oleh sifat masyarakat modern.

Saat ini, klientelisme tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang bersifat tradisional dengan rendahnya perekonomian maupun pendidikan, sehingga terdapat klientelisme baru yang menggeser klientelisme lama (Aspinal dan Sukmajati, 2015: 382).

Dalam klientelisme lama, hubungan antara patron terhadap klien memiliki tingkat loyalitas yang tinggi dan sangat memperhatikan sistem timbal balik, hal tersebut dikarenakan hubungan patron-klien merupakan suatu jalinan yang bersifat personal dan mengikat, sehingga relatif stabil dan bertahan lama. Sedangkan klientelisme baru muncul pada masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi, dimana hal tersebut juga

dipengaruhi oleh menguatnya peran negara pada sektor ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan masyarakat yang lebih maju dan modern, menyebabkan terjadinya suatu hubungan yang kurang hierarkis dengan sifat demokratis yang kuat, hal tersebut membuat rasa hormat dan keterikatan klien terhadap patron menjadi berkurang, sehingga mempengaruhi perubahan perilaku pemilih dan membuka persaingan yang lebih ketat antara para elit politik (Hasrul Hanif, 2009: 333).

Berikut merupakan penjelasan beberapa istilah terkait dengan fenomena patronase dan klientelisme :

Tabel 2.2

Tabel Istilah Patronase dan Klientelisme

No	Daftar Isi Patronase dan Klientelisme	Pengertian
1	<i>Pembelian suara (vote buying):</i>	Proses pemberian materi (uang/barang) dari kandidat kepada pemilih dan biasanya dimulaisesaat atau menjelang pemilihan suara dimulai. Pemberian ini juga diiringi dengan harapan bahwa pemilih akan memilih kandidat yang memberikan materi kepada pemilih tersebut.
2	<i>Pemberian-pemberian pribadi (individual gifts)</i>	Secara teknis, pemberian- pemberian pribadi kandidat kepadapemilih memang sulit dibedakan dengan pembelian suara. Biasanya pemberian pribadi ini digambarkan melalui barang-barang yang berhubungan simbolik dengan kandidat, seperti gantungan kunci ataupun kaos yang bergambarkandidat. Namun secara garis besar, perbedaan yang signifikan antara pemberian pribadi dan pembelian suara terletak pada sistematika pelaksanaannya dimana pembelian suara lebih sistematis ketimbang dengan pemberian pribadi yang dilakukan cenderung secara acak.

3	<i>Barang-Barang Kelompok (club goods)</i>	Kegiatan kandidat dengan memberikan barang-barang kebutuhan yang berhubungan dengan sebuah perkumpulan asosiasi atau kepada komunitas tertentu bisa dikategorikan dalam patronase politik. Dengan banyaknya jumlah komunitas atau organisasi yang berada pada level akar rumput, menjadi sasaran empuk para kandidat dalam menggaet suara secara kolektif. Biasanya kegiatan ini harus dibarengi dengan persetujuan dari tokoh masyarakat setempat, sehingga nantinya kegiatan ini tidak sia-sia dan bisa menjangkau beberapa kelompok masyarakat sekaligus.
4	<i>Pelayanan dan Aktivitas (services and activity)</i>	Kandidat yang melakukan beragam aktivitas yang berhubungan erat dengan beberapa kegiatan pemilihan mereka juga dapat dikategorikan sebagai pola baru dalam patronase politik. Kegiatan semisal pengobatan gratis, pengajian, turnamen olahraga bisa dikategorikan sebagai upaya kandidat dalam menarik perhatian sekaligus mendapatkan suara dari para calon pemilihan mereka.
5	<i>Proyek-Proyek Gentong Babi (pork barrel project)</i>	Istilah ini dikenal cukup baru dalam konteks patronase politik di Indonesia. Pengertiannya secara sederhana adalah penggunaan proyek-proyek pemerintah yang ditujukan kepada daerah tertentu. Ciri khas yang paling mencolok adalah penggunaan dana publik kepada publik itu sendiri. Lebih tepatnya adalah penyalahgunaan wewenang seorang kandidat dengan menggunakan akses mereka dalam proyek-proyek pemerintah. Proyek ini biasanya terdiri dari pengadaan infrastruktur kecil seperti pembangunan balai desa ataupun pembangunan jalan dalam Desa. Bedanya, para kandidat memperlihatkan proyek tersebut sebagai inisiasi murni dari para kandidat. Alih-alih inisiasi murni, kegiatan pork barrel merupakan

	salah satu cara para kandidat untuk mendapatkan suara melalui proyek-proyek publik.
--	---

Sumber : Diolah dari Sukmajati dan Aspinall (2016)

5. Budaya Politik Masyarakat Pedesaan

Pada dasarnya budaya masyarakat pedesaan di Indonesia tidak dapat digeneralisir secara mendasar. Hal ini terkait dengan tingkat keberagaman tingkat suku, agama, dan ras masyarakat Indonesia. Lebih-lebih dengan kondisi masyarakat Jawa, yang secara umum saat ini peneliti klasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang *pertama* masyarakat kelas petani. Kelas ini pada dasarnya bertempat tinggal atau bermukim pada daerah yang secara umum memiliki potensi sumber daya agraria dan perkebunan. Beberapa hal yang menjadi corak utama masyarakat petani adalah karakter dasar yang sangat mengedepankan tradisi-tradisi leluhur (dalam hal ini konteksnya adalah kebudayaan Jawa). Selain mata pencaharian di bidang agraria dan perkebunan, dewasa ini dengan semakin berkembangnya modernisasi sebagian masyarakat petani telah beralih pada pekerjaan yang berhubungan dengan daerah perkotaan. Seperti menjadi supir, pedagang, buruh pabrik, ataupun pekerjaan lainnya yang mengharuskan mereka bekerja di luar daerah mereka.

Kedua, adalah masyarakat pesisir. Kelas ini lebih dikenal dengan karakter masyarakat yang cenderung keras. Ketersediaan sumberdaya yang condong pada kemaritiman mengakibatkan kontrol sosial yang terjadi dalam tatanan masyarakat lebih cenderung dinamis. Artinya bukan berarti masyarakat pesisir lebih tidak menerima perubahan dibandingkan masyarakat pertanian, melainkan aktivitas melaut yang mengharuskan mereka jauh dari

rumah selama beberapa hari bahkan beberapa bulan, menyebabkan kohesifitas masyarakat pesisir sedikit lebih rendah dari pada masyarakat pertanian.

Kondisi masyarakat pedesaan di Jawa tidak sesederhana hanya dengan mengklasifikasikan tipe masyarakat petani dan masyarakat pesisir. Globalisasi serta industrialisasi yang telah terjadi sejak abad 18 telah banyak menyebabkan pergeseran budaya masyarakat pedesaan Jawa. Dengan berdirinya pabrik-pabrik serta industri-industri di perkotaan menyebabkan masyarakat pedesaan banyak terserap menjadi tenaga kerja. Akibatnya mata pencaharian seperti bertani maupun melaut sudah mulai banyak ditinggalkan.

Menurut Gertz (2010:60) Secara garis besar, masyarakat Jawa memiliki pola politik aliran lama yang digambarkan dengan keberadaan golongan Priyayi, Santri, dan Abangan. Ketiga kelompok tersebut mewakili masing-masing golongan modernis, golongan religious tradisional dan golongan nasionalis. Pendapat ini kemudian seiring dengan perkembangan politik nasional pasca reformasi mengalami pergeseran yang signifikan, terlebih dalam konteks keberpihakan masyarakat dalam politik. Beberapa kasus *money politik* yang mulai marak terjadi, ditengarai penulis sebagai salah satu indikator makin mudarnya politik aliran dalam masyarakat Jawa.

Lebih lanjut di era globalisasi seperti saat ini dengan semakin meratanya akses teknologi informasi di pedesaan menyebabkan masyarakat pedesaan lebih memiliki kapasitas dalam sebuah proses politik. Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab I bahwa pada era orde baru pilihan politik masyarakat sudah dibatasi oleh kekuasaan pemerintah saat itu, namun saat ini

dengan semakin baiknya keterbukaan publik maka dalam sebuah proses pemilihan kepala daerah masyarakat lebih memiliki preferensi dalam memilih, entah itu dalam konteks kualitas pemimpin secara individu maupun adanya program kerja yang menjadi andalan dari seorang calon kepala daerah.

Belakangan ini perkembangan globalisasi dan modernisasi di pedesaan ternyata tidak merubah struktur *patron-client* dalam masyarakatnya. Pola-pola hubungan sosial dan ekonomi di pedesaan masihlah kental dengan budaya klientelismenya. Hal ini juga berlaku pada budaya politiknya, di pedesaan budaya patronase politik masih banyak dijumpai dalam bentuk pemilihan kepala desa, atau dalam proses penentuan keputusan di tingkat desa melalui musyawarah sekalipun.

Faulks (2014: 169) menjelaskan Budaya politik sesuai dengan pendefinisian Gabriel Almond dapat dirumuskan sebagai pola-pola khusus orientasi tindakan politik. Artinya budaya politik merupakan sekumpulan produk budaya yang nantinya dapat berimplikasi pada pilihan tindakan politik dari seseorang atau sekumpulan masyarakat. Sejalan dengan budaya masyarakat pedesaan secara umum, budaya masyarakat lebih spesifik dapat dikategorikan dalam beberapa hal salah satunya budaya politik masyarakat pedesaan. Kedua hal tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Bentuk budaya politik pedesaan paling konkrit dapat dilihat saat pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dan proses musyawarah di tingkat desa.

Budaya politik apabila digambarkan dengan sederhana dapat

dirupakan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam proses politik. Namun budaya politik pedesaan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Tidak hanya keikutsertaan atau partisipasi namun latar belakang partisipasi masyarakat pedesaan yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi, kepercayaan, serta pola- pola hubungan masyarakat yang memiliki sejarah panjang sangat menentukan budaya politik di pedesaan. Kompleksitas desa yang menjadi lokasi penelitian ini bertipe masyarakat petani dengan segala fitur-fitur kekinian yang sudah menjadi identitas baru sebuah desa pada umumnya.

6. Konsep Patronase Dalam Kontestasi Politik

Kata sponsorship berasal dari bahasa Latin putter. Artinya bapak, disponsori oleh Bappaks . Sebaliknya customer atau klien berasal dari kata customer yang artinya pengikut. Apakah mereka dulunya orang bebas atau mereka mantan orang merdeka. Mereka bergantung pada pelanggan dan terkadang bahkan menggunakan nama panggilan pelindung. (Ichsan, 2016 : 28)

Patronase adalah konsep kekuatan yang dihasilkan Hubungan yang tidak setara antara sponsor dan pelanggan. Padahal, ketimpangan ini erat kaitannya dengan kepemilikan, koneksi terikat pada keuntungan dan dimanipulasi untuk tujuan masing-masing, tetapi keduanya dalam keadaan yang tidak setara.

“A sponsor-client relationship (a relationship between roles) can be defined as a special case of a two-party (two-person) relationship. This includes excellent means of friendship to secure a higher socio-economic status (sponsor) with one's influence and resources. The protection and/or benefit of a lower status individual (Customer) providing general assistance, including personal services, to Sponsor.”
 “Hubungan sponsor-pelanggan, hubungan berbagi peran, dapat didefinisikan sebagai kasus khusus dari hubungan dua orang. Ini

mempengaruhi orang (sponsor) dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi yang menggunakan sumber daya mereka. Kami merespons dengan memberikan perlindungan dan/atau manfaat kepada orang-orang berstatus rendah (pelanggan) dan dengan memberikan dukungan umum kepada sponsor, termasuk layanan pribadi.”

Dengan mengacu pada penjelasan di atas, sponsorship tidak tepat tetapi didasarkan pada hubungan yang kita saling membutuhkan Sponsor, di sisi lain, seperti orang yang memiliki keunggulan dalam hal status, kekayaan, dan pengaruh. Pelanggan, di sisi lain, ada sebagai anggota komunitas yang tidak memiliki sumber sponsor. Oleh karena itu, dalam konteks ini, suatu hubungan dapat didefinisikan sebagai hubungan yang didasarkan pada pertukaran keuntungan. Mekanisme dalam setiap kasus adalah: Kelompok sponsor memberikan dukungan keuangan: Perlindungan untuk kelompok pelanggan atau bawahannya. Dan sebagai imbalan atas penghargaan ini, kelas pelanggan mensponsori dukungan, komitmen, dan loyalitas.

Pertukaran tetap tidak seimbang terlepas dari apakah sponsor didasarkan pada nilai pembagian kepentingan. Ini karena kita langsung mengelola sumber daya terpenting (sumber daya premium) yang muncul di masyarakat dan bangsa. Sumber daya ini dapat berupa pekerjaan, posisi, lisensi, dan format lainnya. Konsisten dengan fenomena ini, sponsor Tier 2 (sumber daya Tier 2) yang dikenal sebagai broker tersedia yang tidak memiliki sumber daya utama atau strategis. Pialang yang bertindak sebagai perantara antara klien, sponsor utama, makmur dalam kediktatoran karena mereka dilihat sebagai perpanjangan dari individu utama. (Leo Agustino, 2014)

Untuk lebih memahami, sponsorship adalah bagi hasil di antara politisi,

untuk memungkinkan politisi secara individual mendistribusikan sesuatu kepada karyawan, pemilih, atau kelompok kepentingan untuk dukungan politik.

7. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Menurut Wasistiono dalam Neneng (2016: 232) Pilkades merupakan miniatur dari pemilu yang dilaksanakan pada tingkat desa yang bertujuan untuk memilih kepala desa. Hal ini sebagai wujud dari terpenuhinya hak dan wewenang masyarakat desa dalam proses politik. Selain itu pilkades juga merupakan cermin dari proses demokrasi yang terjadi di desa. Pilkades juga tidak dapat terlepas dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades juga bukan serta merta sebuah proses perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa, melainkan lebih dari itu menyangkut harga diri dan kehormatan sehingga sering kali memunculkan dinamika di masyarakat.

Sebagai tim pelaksana pilkades BPD membentuk panitia yang bertugas untuk mengatur dan memantau jalannya pilkades agar tetap berjalan tertib. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis pilkades memiliki pedoman pelaksanaan yang telah tercantum pada Permendagri RI No.112 tahun 2014. Adapun pada penyelenggaraan pilkades, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, baik dari perencanaan yang berupa pembentukan panitia dan persiapan calon kepala desa hingga pelaksanaannya pada waktu yang telah ditentukan. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan yang dilakukan oleh BPD kepada kepala desa tentang berakhirnya masa jabatan. Dimana, pemberitahuan tersebut disampaikan

pada enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

b. BPD membentuk panitia pilkades yang dilakukan setelah sepuluh hari pemberitahuan akhir masa jabatan. Tugas dari panitia tersebut adalah:

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan seluruh tahapan pelaksanaan pilkades.
2. Merencanakan dan mengajukan biaya penyelenggaraan pilkades kepada bupati melalui camat.
3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih bagi masyarakat yang memiliki hak pilih.
4. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bagi bakal calon kepala desa.
5. Menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan, dan menetapkan tata cara kampanye.
6. Memberikan fasilitas guna melancarkan agenda pilkades yang diselenggarakan, baik berupa peralatan, perlengkapan, maupun tempat.
7. Melaksanakan pemungutan suara serta menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang kemudian diumumkan kepada masyarakat.
8. Menetapkan calon kepala desa yang telah terpilih dan melakukan evaluasi terhadap pilkades yang telah diselenggarakan.

c. Penetapan pemilih, dimana masyarakat desa yang telah memiliki hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih dengan syarat:

1. Masyarakat desa yang telah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah.

2. Tidak mengalami gangguan kejiwaan maupun gangguan ingatan.
 3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya karena putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.
 4. Berdomisili pada desa yang melaksanakan pilkades sekurang-kurangnya enam bulan, yang dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- d. Penelitian bakal calon kepala desa oleh panitia pilkades. Dimana, penelitian tersebut dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
 - e. Panitia pilakdes memberikan pengumuman kepada masyarakat terkait hasil penelitian bakal calon kepala desa yang berhak dipilih.
 - f. Calon kepala desa dapat melakukan kampanye kepada masyarakat sesuai dengan sosial budayanya yang dilakukan pada tiga hari sebelum dimulainya hari tenang. Kampanye tersebut dapat berupa penyampaian visi-misi, maupun berbagai rancangan kebijakan yang akan dilaksanakan guna memajukan desa.
 - g. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan selebaran kepada masyarakat yang berisi foto, nomor, dan nama dari para calon kepala desa pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang telah ditentukan.
 - h. Perhitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan oleh panitia pilkades dengan disaksikan oleh saksi calon kepala desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. dimana, bagi calon kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak akan terpilih menjadi kepala desa.
 - i. Penetapan, pengesahan, dan pengangkatan kepala desa yang dilakukan oleh bupati berdasarkan laporan yang diberikan oleh panitia pilkades kepada

BPD terkait hasil pilkades yang telah diselenggarakan.

Dalam pelaksanaannya setiap desa memiliki karakter serta kearifan lokalnya masing-masing sehingga pelaksanaan dari tahapan pilkades sering kali memunculkan dinamika dan konflik. Keberlangsungan dinamika dan konflik tersebut tergantung bagaimana aktor-aktor desa serta masyarakat desa menanggapi dan menyelesaikannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. diyakini terkait dengan penelitian para peneliti saat ini. Oleh karena itu, penulis berikut telah melakukan beberapa penelitian yang mungkin terkait dengan judul saat ini.:

1. Peran Local Strongmen Dalam Pemilihan Kepala Desa Ramdori Kecamatan Swandiwe Kabupaten Biak Numfor. Jurnal Lyceum Vol 4 No 1 Januari 2016 oleh Ratnasari Paraisu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polittik Universitas Pembangunan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan salah satu calon walikota desa itu karena keterlibatan kekuatan di belakangnya, Mambri. Dalam hal ini, ia dapat mempengaruhi cara pandang politik dan tindakan politik masyarakat. Pemilihan kepala daerah. Pemimpin Keret atau Mumabri dapat menggunakan modal simbolik, sosial, dan ekonomi mereka untuk mempengaruhi pemungutan suara masyarakat untuk memenangkan salah satu kandidat sesuai dengan arahan mereka.

2. Civil Society, Shadow State Dan Local Strongmen Dalam Kajian Politik Lokal. Jurnal Ilmu Pemerintahan oleh Gili Argenti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang.

Kajian tersebut menjelaskan bahwa penduduk lokal yang kuat adalah orang tua dengan sumber dana yang tidak terbatas. Penduduk lokal yang kuat memiliki kesempatan untuk menduduki kursi sentral dalam badan pemerintahan sendiri lokal. Bahkan jika mereka tidak dapat memegang posisi penting ini, mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa politik lokal bergantung pada bantuan mereka..

3. Orang Kuat Lokal Di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kemunculan Keda Dalam Eksploitasi Tambang Emas Di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 2 No. 2, Juli 2016 oleh Marcelino Solissa.

Temuan dari studi terhadap orang kuat lokal menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di Hageyama dapat mengubah para aktor ini, yang semula hanya memikirkan masyarakat adat di wilayah tersebut, menjadi penduduk lokal yang kuat. Apa peran pengelola lokal dalam mengawasi kegiatan penambangan ini? Cara yang digunakan pemerintah daerah untuk menggagalkan kebijakan pemerintah menghentikan penambangan liar. Dalam hal ini, pemimpin daerah berhasil memperoleh kekuasaan dengan memanfaatkan kelemahan negara, yaitu dengan membangun jaringan dengan pemangku kepentingan lembaga formal dan informal. Keberhasilan KEDA membuatmu kuat varian, basis sebagai pemilik tanah adat,

berhasil menguasai para penambang yang melakukan aktivitas di tambang emas. KEDA berhasil mengontrol pembangunan ekonomi.

4. Sinergi Local Strongmen : Pengusaha dan Tokoh Agama Dalam Pemilihan Legislatif 2014 Di Demak. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. Oleh Khoirul Minan.

Dari hasil kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pribumi yang kuat sebagai aktor sosial berperan dalam struktur sosial. Secara khusus, para kiai pengusaha memiliki fungsi utama mengembangkan kualitas dalam teori fungsi struktur. Masyarakat sekitar. Mereka mempengaruhi sistem yang ada melalui sinergi dengan perilaku politik mereka. Mengikuti contoh pemilihan parlemen, calon anggota parlemen menerima suara terbanyak. Seperti kasus Ahmad Mansur, S.E. di Demak.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

